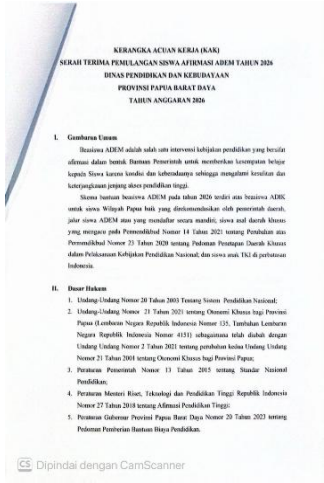
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Tanjung Pinang Belakang Mega Mall, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong

LAMPIRAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
SUMBER DANA OTSUS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN
A.	Program Pengelolaan Pendidikan		
1.	Peningkatan Mutu Akademi Komunitas		
1).	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya		1. Serah Terima Pemulangan Siswa Afirmasi Adem Tahun 2026 2. **Sumber Dana : Silpa DBH Migas Otsus Tahun 2025-Silpa Non Efisiensi** 3. Nilai : Rp. 169.390.000,00-

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SERAH TERIMA PEMULANGAN SISWA AFIRMASI ADEM TAHUN 2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Gambaran Umum

Beasiswa ADEM adalah salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk Bantuan Pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada Siswa karena kondisi dan keberadaanya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan jenjang akses pendidikan tinggi.

Skema bantuan beasiswa ADEM pada tahun 2026 terdiri atas beasiswa ADEM untuk siswa Wilayah Papua baik yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah, jalur siswa ADEM atau yang mendaftar secara mandiri, siswa asal daerah khusus yang mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pendidikan atau Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional; dan siswa anak TKI di perbatasan Indonesia.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner